



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan,     Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



**Drs. SOEROSO, M.Pd**

Pembina Tingkat I

NIP.19640921 198803 1 007

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016–2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 230.167.380.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 212.330.667.750,- (92,25%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 15 (lima belas) program dengan 80 (delapan puluh) kegiatan. Dinas Pendidikan sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui penyediaan anggaran bantuan biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada setiap satuan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan antara lain membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembenahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	2
3. Gambaran Organisasi .....	3
3.1 Dasar Pembentukan, Tugas dan Fungsi .....	3
3.2 Struktur Organisasi .....	4
3.3 Sumber Daya Manusia.....	6
4. Isu Strategis .....	7
5. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	10
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	11
2.5. Perjanjian Kinerja 2020 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	15
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	16
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	19
BAB IV PENUTUP.....	40

LAMPIRAN :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Perjanjian Kinerja Perubahan 2020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP );
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021

## C. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan, tugas dan fungsi
  - a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;

- b. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal ataupun non formal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan;
- d. penyusunan pedoman, pelaksanaan, dan evaluasi kompetisi peserta didik, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
- e. pembinaan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah;
- g. pengawasan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- h. pengawasan dan pembinaan pelayanan perpustakaan sekolah dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM);
- i. pengkoordinasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan;
- j. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- l. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- n. memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
- p. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan;
- q. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pembinaan pendidikan dasar;
- r. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar

- dan sarana prasarana kantor;
- s. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan dasar;
  - t. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan;
  - u. Pengkoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;
  - v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SD;
  - 2) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SMP;
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PAUD
  - 2) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PNF;
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD/PNF
- e. Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
  - 1.) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF;
  - 2.) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
  - 3.) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :

- 1.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
- 2.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- 3.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas SD;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas SMP;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas TK/PAUD;
- d. Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal
- e. Jabatan Fungsional Guru.

### 4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota di dukung oleh 115 (Seratus lima belas) orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel  
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Pengawas SMP	7
7.	Pengawas SD	12
8.	Pengawas PAUD/TK	4
9.	Penilik	6
10.	Pranata Komputer	1
11.	Pelaksana PNS	36
12.	Pelaksana Non PNS	29
	Jumlah	115

Tabel  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I / IV.b	18
2.	Pembina / IV.a	14
3.	Penata Tingkat I / III.d	23
4.	Penata / III.c	5
5.	Penata Muda Tingkat I / III.b	6
6.	Penata Muda / III.a	4
7.	Pengatur Tingkat I / II.d	8
8.	Pengatur / II.c	3
9.	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	4
10.	Pengatur Muda	1
11.	Non PNS	29
	Jumlah	86

Tabel  
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	S2	19	2	21
2.	S1	45	9	54
3.	D3	10	11	21
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA	11	10	21
7.	SLTP	0	2	2
8.	SD	1	2	3
	Jumlah	86	29	115

Tabel  
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

NO.	Usia	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	56 tahun lebih	25	-	25
2.	51-55 tahun	20	1	21
3.	46-50 tahun	15	3	18
4.	41-45 tahun	10	1	11
5.	36-40 tahun	12	4	16
6.	31-35 tahun	3	7	10
7.	26-30 tahun	1	6	7
8.	18-25 tahun	0	7	7
	Jumlah	86	29	115

#### D. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan

melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam masa tumbuh kembang anak;
2. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peningkatan akses layanan pendidikan dengan lebih memperhatikan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
4. Penambahan Unit Sekolah Baru dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, rasio ketersediaan sekolah, dan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
5. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan disertai upaya penyelenggaraan pendidikan yang lebih terjangkau;
6. Pengembangan pendidikan ketrampilan disertai dengan penumbuhan jiwa kewirausahaan kreatif;
7. Peningkatan kualitas pendidikan budi pekerti didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia.
8. Peningkatan akses layanan pendidikan melalui pemberian beasiswa;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki serta menyelaraskan dengan kebutuhan pasar;
10. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri ( DU/DI );
11. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal S1/D4 dan linear dengan bidang tugasnya, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI;
12. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 meliputi :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Landasan Hukum, Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi Rencana Strategis, Target IKU dan Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### BAB IV PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 050/A.2/2308.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Pekalongan sebagai berikut :

3.5.1.1. Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah :

- a. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan yang merata
- b. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang bermutu
- c. Meningkatkan implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

3.5.1.2. Sasaran, sasaran dari Dinas Pendidikan adalah :

- a. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal)
- c. Meningkatnya Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Sekolah
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

## C. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan :

Tabel IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020

NO	INDIKATOR	RUMUS	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)</i>								
1	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD dibagi jumlah Penduduk usia 3-6 tahun			62,50	65,00 %	67,50%	61%
2	Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Jumlah Peserta Didik Jenjang Dikdas dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun			100	100%	100%	100%
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (Dasar, anak usia dini dan PNF)</i>								
1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas kali 100%			70,00	75,00 %	68,45%	69,56%
2	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD kali 100%			2,50	3,50%	9%	9,09%
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah</i>								
NO	INDIKATOR	RUMUS	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
1	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Jumlah siswa SD dan SMP Negeri yang mendapat pendidikan keagamaan sesuai dengan agamanya			100%	100%	100%	100%
2	Persentase implementasi pendidikan karakter	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter			5%	10%	100%	100%

	di sekolah	dibagi jumlah seluruh sekolah						
3	Angka kenakalan pelajar	Jumlah siswa Jenjang Dikdas yang terlibat Kasus Kenakalan Pelajar per seratus siswa jenjang Dikdas			5	4	3	0
<i>Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja</i>								
4	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N		66,67	70,61	72,5	75	77,5
<i>Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>								
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	600	700	800	800	850	700

#### D. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberi amanah/ tanggung jawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari Perjanjian Kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2020 terdapat 5 (Lima) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020. Berikut adalah Perjanjian Kinerja di bidang pendidikan Tahun 2020 dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel

## Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	67,50%
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	68,45%
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	9%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	100%
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	100%
		Angka kenakalan pelajar	3
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	75
5	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Predikat capaian Kinerja

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator 11 Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel  
Capaian IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	67,50%	60,28%	89,30%	61,00%	98,81%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir rpjmd)
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	100,00 %	102,65%	102,65%	100,00 %	102,65%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	68,45 %	69,56%	101,62%	69,56%	100%
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	9%	9,09%	101%	9,09%	100%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	20%	100%	500%	100%	100%
		Angka kenakalan pelajar	4	NA	NA	0	NA
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	75	73,83	98,44	77,5	95,26%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	850	516	60,71	700	73,71%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ada yang melebihi target, sama dengan target dan kurang/ tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator Kinerja Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas, indikator Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A,

indikator Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A, indikator Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A, indikator Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah mencapai target diatas 100%.

- b. Capaian Indikator kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah.
- c. Capaian Indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/TK, Nilai Evaluasi AKIP, dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- d. Capaian yang tidak bisa disajikan datanya ditunjukkan untuk indikator Angka Kenakalan Pelajar, disebabkan Data Kenakalan remaja berasal dari Pol. PP/ Kepolisian, dan kenakalan remaja biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi, pelajar berada di luar pengawasan sekolah

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan sebanyak 5 (Lima) Sasaran Strategis dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya dan target sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Analisis Capaian Sasaran 1  
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD/ TK	69,64	67,50 %	60,28%	89,30%	70,00%	86,11%
2	Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	100,81	100%	102,65%	102,65%	100%	102,65%
Rata-rata Capaian					95,97%		

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator dari sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar) hanya satu yang berhasil mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 95,97% atau dengan interpretasi sangat baik. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa daya serap lembaga pendidikan jenjang PAUD/ Dasar terhadap penduduk usia sekolah PAUD/ Dasar mengalami perkembangan yang positif. Pencapaian target indikator Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar) didukung oleh Program antara lain :

#### 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 366.805.000,00 dan realisasi Rp. 338.132.724,00 melalui 4 (empat) kegiatan dengan indikator output sebanyak 9 indikator melalui kegiatan di Dinas Pendidikan. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 9 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Program PAUD	Kegiatan	1	1
		Jumlah Anak Didik Penerima Bantuan AlatTulis	Anak	250	250
2	Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD	Jumlah Lembaga yang difasilitasi penyaluran bantuannya	lembaga	255	255
		Jumlah PAUD peserta Desk penggunaan Dana BOP	lembaga	210	210
4	Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK Pembina	Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	4	4
	Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)	Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	4	4
		Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	3	3

Dari tabel diatas dapat dilihat target indikator output pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seluruhnya dapat tercapai .

#### 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan PAUD dan PNF

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 242.800.000,00 dan realisasi Rp. 240.572.600,00 melalui 5 (Lima) Kegiatan, dengan

indikator output sebanyak 8 indikator, sebanyak 8 indikator tercapai.

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			satuan	Angka	
1	Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga yang mengikuti Diklat	Lembaga	60	60
		Jumlah PAUD yang difasilitasi	Lembaga	60	60
2	Pengembangan model PAUD Holistik Integratif	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUD Holistik Integratif	peserta	50	50
		jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi	Lembaga	4	4
3	Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang difasilitasi	Lembaga	4	4
4	Penyengkenggaraan Akreditasi PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Proses Akreditasinya	Lembaga	60	60
5	Penguatan kelembagaan Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga PNF yang mengikuti sosialisasi akreditasi	Lembaga	11	13
		Jumlah lembaga PNF yang mengikuti Workshop	Lembaga	12	13

Terdapat 2 (dua) indikator output pada program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF, yaitu pada kegiatan Penguatan kelembagaan pendidikan non formal dan indikator jumlah lembaga PNF yang mengikuti Workshop. Capaian melebihi target karena ada tambahan Lembaga PNF Baru di tahun 2020.

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 17.258.159.000,00 dan realisasi Rp. 14.584.512.670,00 melalui 15 (lima belas) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 39 indikator.

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1	Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI	Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun	ruang	4	4
2	Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru TK/ PAUD Swasta yang dibangun	ruang	4	3
		Jumlah Ruang Kelas PAUD Negeri yang dibangun	ruang	2	2
		Jumlah Ruang Kelas Baru PKBM yang dibangun	ruang	1	1
3	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI	Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri	pekerjaan	1	1
		Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri	pekerjaan	4	4
		Pembangunan KM/WC	pekerjaan	1	1
		Jumlah Mushola yang dibangun	pekerjaan	1	1
4	Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs	Jumlah meja kursi siswa SMP Negeri dan Swasta yang diadakan	paket	8	8

5	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs	Jumlah lapangan olahraga sekolah yang dibangun	sekolah	1	1
		Jumlah tempat parkir siswa sekolah yang dibangun	sekolah	2	2
		Jumlah Pagar SMP Negeri yang dibangun	pekerjaan	4	3
		Jumlah ruang kelas yang direhab	ruang	1	1
6	Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD	Jumlah sarana pendidikan di TK/Paud yang diadakan	Sekolah	4	4
7	Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD	Jumlah WC / kamar mandi di TK Negeri dan swasta yang dibangun	Unit	4	4
8	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI	Jumlah Kamar Mandi / WC yang direhab	Unit	2	2
		Jumlah Ruang Kelas yang direhab	ruang	4	4
9	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs	Jumlah sekolah yang ditinggikan halamannya	sekolah	1	1
		Jumlah WC / kamar mandi siswa yang direhab	Unit	2	2
		Jumlah Musholla SMP Negeri yang direhab	ruang	1	1
		Jumlah ruang serba guna yang direhab	sekolah	1	1
		Jumlah ruang kelas SMP Negeri yang direhab	ruang	2	2
10	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD	Jumlah ruang belajar di TK Swasta yang direhab	ruang	2	2
		Jumlah Ruang Belajar PAUD Negeri yang direhab	pekerjaan	7	6
		Jumlah Bangunan PKBM yang direhab	pekerjaan	3	3
11	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	ruang	22	22
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	ruang	5	5
		Jumlah Kamar Mandi / WC yang direhab	Unit	20	20
12	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)	Jumlah WC / Kamar mandi yang dibangun	Unit	7	7
		Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun	ruang	6	6
		Jumlah Kamar Mandi / WC SMP yang direhab	Unit	4	4
13	Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK)	Jumlah ruang kelas TK yang direhab	Unit	3	3
		Rehab TK Negeri Pembina Kota	Unit	1	0
		Jumlah jamban TK yang direhab	Unit	3	3
14	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI (Bantuan Provinsi)	Jumlah Notebook/Laptop yang diadakan	unit	144	0
		Jumlah Printer yang diadakan	unit	72	0
		Jumlah LCD Proyektor yang diadakan	unit	72	0
15	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs (Bantuan Provinsi)	Jumlah Notebook/ Laptop yang diadakan	unit	8	0
		Jumlah Printer yang diadakan	unit	2	0
		Jumlah LCD Proyektor yang diadakan	unit	2	0

Dari tabel di atas dapat dilihat sebanyak 30 target indikator output tercapai, indikator Jumlah Ruang Belajar PAUD Negeri yang direhab hanya tercapai 6 pekerjaan dan 1 pekerjaan dialihkan untuk peninggian Halaman SD Negeri Kandang Panjang 10.

Untuk kegiatan Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI (Bantuan Provinsi) dan Kegiatan Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs (Bantuan Provinsi) ditetapkan di akhir tahun 2020 sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan 100%.

#### 4. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 29.568.533.000,00 dan realisasi Rp. 27.626.458.227,00 melalui 6 (enam) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 8 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai, didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	jumlah sekolah yang difasilitasi penyaluran dan SPJ BOS	sekolah	130	130
		Jumlah sekolah penerima dana BOS	sekolah	130	130
2	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	jumlah SD negeri yang mendapatkan BOS	Sekolah	71	71
3	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	jumlah SMP penerima dana BOS	sekolah	17	17
4	Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar	Jumlah sekolah peserta PPDB online	sekolah	23	23
5	Fasilitasi Operasional Pendidikan SD	Jumlah SD negeri penerima dana FOP	SDN	71	71
		Jumlah peserta pelatihan batik	Siswa	300	300
6	Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP	Jumlah SMP negeri penerima dana FOP	SMPN	17	17

## Analisis Capaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1.	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	68,45%	68,45%	69,56%	101,62%	85%	81,84 %
2.	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	9,09%	9,00%	9,09%	101%	5,50%	165,27%
Rata-rata Capaian					101,71%		

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) memiliki 2 (dua) Indikator dari sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) hanya satu Indikator kinerja yang berhasil melebihi target, namun rata-rata capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) sebesar 101,71% atau dengan interpretasi sangat baik.

Pencapaian target indikator meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) didukung oleh :

### 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah sekolah yang difasilitasi proses akreditasinya	Sekolah	33	33
2		Jumlah peserta sosialisasi akreditasi sekolah	Sekolah	33	33
3	Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1
4		Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1
5		Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1
6		Jumlah kegiatan koreksi LJK try out	kegiatan	1	1
7	Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta)	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
8		Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
9	Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta)	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
10		Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1

11		Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi	SMP/MTs	37	37
12	Penyelenggaraan UN dan US	Jumlah sekolah yang difasilitasi penulisan Ijazah Sekolah	Sekolah	27	27

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 12 Indikator kegiatan tercapai, dan karena Pandemi dan Sistem Pembelajaran yang dilakukan secara daring sehingga Ujian Sekolah/ Ujian Nasional yang dilaksanakan maka ada beberapa indikator kegiatan yang dihapus yaitu Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi, Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi, Jumlah kegiatan UN dan UNPK yang difasilitasi.

## 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 17.484.093.000,00 dan realisasi Rp. 17.369.459.000,00 melalui 7 (tujuh) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 30 indikator. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF	Jumlah dokumen bezetting PTK PAUD yang disusun	Dokumen	1	1
2		Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK PAUD	Orang	54	54
3		Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD yang dilaksanakan	kali	4	4
4		Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK PAUD dan PNF yang difasilitasi	Organisasi	4	4
5		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD	Orang	200	200
6	Pembinaan dan pemetaan PTK SD	Jumlah dokumen bezetting PTK SD yang disusun	Dokumen	1	1
7		Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK	orang	71	71
8		Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya	Orang	3	3
9		Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang difasilitasi	Organisasi	2	2
10	Pembinaan dan pemetaan PTK SMP	Jumlah dokumen bezetting PTK SMP yang disusun	Dokumen	1	1
11		Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK	Orang	30	30

12		Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya	orang	2	2
13		Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang difasilitasi	Organisasi	2	2
14	Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK PAUD dan PNF	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD yang dilaksanakan	kali	4	4
15		Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD	Orang	200	200
16		Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1	Orang	75	75
17		Jumlah guru PAUD terfasilitasi PAK	guru	49	49
18		Jumlah pembekalan untuk PTK PAUD dan PNF yang diadakan	kegiatan	2	2
19		Jumlah peserta pembekalan untuk PTK PAUD dan PNF	peserta	75	75
20	Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SD	Jumlah bimtek untuk PTK SD yang diadakan	bimtek	1	1
21		Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1	Orang	7	10
22		Jumlah PTK SD difasilitasi PAK	Orang	704	704
23		Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan SD yang dilaksanakan	kali	2	2
24		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan ketenagaan SD	orang	213	213
25		Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 4 Tahunan	Sekolah	7	7
26	Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SMP	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan SMP yang dilaksanakan	kali	2	2
27		Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan SMP	Orang	56	56
28		Jumlah guru SMP difasilitasi PAK	Orang	300	300
29	Peningkatan kesejahteraan PTK	Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung	Orang	1871	1738
30		Jumlah satuan pendidikan swasta yang PTK nya difasilitasi Jasa kinerja	sekolah/ madrasah	99	96

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan akhir Tahun 2020, 28 indikator tercapai dan 2 indikator Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK tidak tercapai.

Jumlah PTK Non PNS Penerima Bantuan Harlindung pada tahun 2020 terealisasi sejumlah 1738 orang dari target sejumlah 1871. Jumlah PTK calon penerima bantuan harlindung berkurang karena telah memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri, sedangkan realisasi Jumlah satuan pendidikan Swasta yang PTK nya difasilitasi Jasa Kinerja dari target sebanyak 99 sekolah/Madrasah hanya tercapai sejumlah 96 Sekolah/ Madrasah, karena 3 madrasah ibtidaiyah (MI) mengalami regrouping sehingga jumlah madrasah penerima bantuan jasa kinerja berkurang.

### 3. Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 81.200.000,00 dan realisasi Rp. 80.150.000,00 melalui 2 (dua) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 4 indikator telah tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1.	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	Sekolah	4	4
		Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang difasilitasi	SD	4	4
2.	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP	Jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	Sekolah	1	1
		Jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang difasilitasi	SMP	1	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua target dapat tercapai. Kota Pekalongan menyediakan sekolah dengan layanan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus sebanyak 4 sekolah untuk Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Bendan 1, SD Negeri Poncol 3, SD Negeri Kuripan Kidul 2 dan SD Negeri Panjang Wetan 3. Sedangkan untuk SMP hanya terdapat 1 sekolah yaitu SMP Negeri 10 Pekalongan.

### 4. Program Pendidikan Non Formal

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 226.450.000,00 dan realisasi Rp. 226.383.500,00 melalui 4 (empat) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 6 indikator, sebanyak 6 indikator tercapai dan 0 indikator

tidak tercapai. Adapun Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1	Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan	Jumlah Rapat Persiapan Ujian Kesetaraan	kali	6	6
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C	Jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A, B, C	siswa	130	130
3		Jumlah dokumen data warga belajar yang valid	dokumen	1	1
4	Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah	jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah	Anak	25	25
5		jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainnya	Anak	15	15
6	Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan	Jumlah lembaga Kejar Paket yang mengikuti uji coba UNBK	Lembaga	17	17

Untuk kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Indikator Jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah dan Jumlah pendampingan anak putus sekolah yang mendapatkan fasilitasi pendidikan lainnya merupakan indikator baru, di triwulan 1 Jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah diperoleh data 50 anak sekolah, tetapi yang berhasil kembali ke sekolah hanya 25 anak sehingga terjadi perubahan target. Demikian juga dengan indikator Jumlah pendampingan anak putus sekolah yang mendapatkan fasilitasi pendidikan lainnya semula di diperoleh data 50 anak sekolah, akan tetapi yang berhasil mendapatkan fasilitasi pendidikan sejumlah 15 anak karena anggaran di refocussing.

Analisis Capaian Sasaran 3  
Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di Sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	67,34%	20%	100%	500%	30%	333,33
3	Angka Kenakalan Pelajar	na	na	na	na	2	Na
Rata-rata Capaian					200%		

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatnya implementasi pendidikan

keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kedua Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah, berhasil melebihi target karena Perubahan formulasi perhitungan, sebelumnya (saat menentukan target) perhitungan didasarkan pada jumlah sekolah yang menerapkan penguatan pendidikan karakter sesuai Perwal Penguatan Pendidikan karakter, menjadi Sekolah yang telah menggunakan Kurikulum 2013 (sudah ada aspek penguatan karakter). Sedangkan untuk indikator Angka kenakalan pelajar dengan target tahun 2020 sejumlah 3 siswa/ 100 siswa tidak bisa disajikan datanya. Data Kenakalan remaja berasal dari Pol. PP/ Kepolisian, dan kenakalan remaja biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi, pelajar berada di luar pengawasan sekolah.

Pencapaian Target indicator Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah didukung oleh :

#### 1. Program Pembentukan Karakter anak

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 238.260.000,00 dan realisasi Rp. 225.998.500,00 melalui 3 (tiga) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 6 (enam) indikator telah tercapai dan 1(satu) indikator tidak tercapai.

No	Kegiatan	Indikator Output	Target		Capaian
			Satuan	Angka	
1	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	jumlah kurikulum dan bahan ajar Pendidikan karakter PAUD yang dikembangkan	dokumen	2	2
2		Jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum	lembaga	25	25
3	Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD	Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan	lomba	6	6
4		Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat	lembaga	4	4
5		Jumlah pendidik yang mendapat apresiasi bunda PAUD	orang/ lembaga	31	31
6	Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi workshop pendidikan karakter	lembaga	250	250
7		jumlah lembaga yang terfasilitasi pendidikan keluarga	lembaga	150	150

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 238.260.000,00 dan realisasi Rp. 225.998.500,00 melalui 3 (tiga) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 7 indikator telah tercapai.

## 2. Program Pembentukan Karakter Siswa

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.988.626.000,00 dan realisasi Rp. 2.984.338.950,00 melalui 4 (empat) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 5 indikator telah tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian
			Satuan	Angka	
1	Peningkatan Pembelajaran BTQ	Jumlah penerima bantuan transport	orang	1.200	1.130
2		Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ	siswa	5.000	5.000
3	Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas	Jumlah kurikulum muatan/budaya lokal yang disusun	kurikulum	1	1
4	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni	Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi	kegiatan	5	0
5		Jumlah Jenis Kompetensi jenjang SD/SMP tk. Kota yang difasilitasi	kegiatan	5	1
6	Fasilitasi kegiatan kepramukaan	jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan kepramukaan	Sekolah	88	88
7		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan	lomba	7	7
8		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota	lomba	7	7

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah penerima bantuan transport pada kegiatan Peningkatan pembelajaran BTQ tercapai 1.130 orang dari target sebesar 1200 orang. Hal tersebut dikarenakan jumlah guru BTQ yang terdaftar lebih sedikit dari target, sehingga perlu menghitung ulang target capaian indikator dan mengajukan perubahan target yang akan digunakan untuk periode berikutnya. Sedangkan indikator pada kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni, pada saat usulan perubahan sudah di input pada aplikasi akan tetapi hasilnya tidak tersimpan, target belum

berubah, sehingga target tidak tercapai.

Analisis Capaian Sasaran 4  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Nilai Evaluasi AKIP	72,61	75	73,08	97,44	77,5	94,29
Rata-rata Capaian					97,44		

Berdasarkan tabel diatas target indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP tahun 2020 sebesar 75 dan berhasil terealisasi sebesar 73,08 sehingga capaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar 97,44% . Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020 belum berhasil mencapai target.

Pencapaian target indikator Nilai Evaluasi AKIP didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

No.	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12

9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	11
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	bulan	114	114

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Angka	Capaian 2020
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	4	4
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	40	56
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	10	10
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12

## 3. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja (Penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	6	6
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan) SAKIP (Perjanjian Kinerja penetapan dan perubahan, rencana aksi, LKjIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	6	6
3	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	dokumen	5	5
4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan	Laporan	92	92
5	Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola	kegiatan	2	2

## 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 700.571.000,00 dan realisasi Rp. 696.584.400,00 melalui 8 (delapan) Kegiatan, dengan indikator output

sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2020, 9 indikator telah tercapai. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Indikator Output	Target 2020		Capaian 2020
			Satuan	Angka	
1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah kegiatan yang dievaluasi kinerjanya	kegiatan	87	87
2	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data yang dilaksanakan	aplikasi	2	2
3	Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan	Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1
4	Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik)	Jumlah sekolah yang difasilitasi pendataan pendidikan	sekolah	130	130
5	Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (Bantuan Provinsi)	jumlah satuan pendidikan yang terfasilitasi pendataan profil sekolah	sekolah	250	250
6	Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan pendidikan dasar	Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi	kegiatan	1	1
7		Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan EDS, Penilaian dan pemetaan mutu	sekolah	130	130
8	Fasilitasi penyusunan APBS	Jumlah SD dan SMP yang mengikuti desk e-APBS (RKAS BOS)	sekolah	130	130
9		Jumlah SD dan SMP swasta yang mengikuti pelatihan e-APBS	sekolah	42	42

### Analisis Capaian Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1000	850	516	60,71%	900	57,33
Rata-rata Capaian					60,71%		

berdasarkan tabel diatas target indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 sebesar 850 dan berhasil terealisasi sebesar 516 sehingga capaian kinerja tahun 2020 sebesar 60,71% dari target ditetapkan.

Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2020 belum berhasil mencapai target dan mendapat predikat cukup informatif.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 8 (Delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1      terdiri dari 2 indikator dengan persentase nilai capaian 95,97% atau interpretasi sangat baik.
  
- Sasaran 2      terdiri dari 2 indikator dengan presentase nilai capaian 101,71% atau interpretasi sangat baik.
  
- Sasaran 3      terdiri dari 3 indikator dengan presentase nilai capaian 200% atau interpretasi sangat baik.
  
- Sasaran 4      terdiri dari 1 indikator dengan presentase nilai capaian 97,44% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan presentase nilai capaian 60,71% atau interpretasi Cukup.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (Lima) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 230.167.380.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 212.330.661.750,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,25% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 17.836.718.250,00 yang merupakan Silpa Belanja Tidak Langsung yaitu Rp. 12.883.110.454,00 dan Silpa Belanja Langsung Rp. 4.953.607.796,00

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



Drs. SOEROSO, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP.19640921 198803 1 007